

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara demokrasi, Indonesia telah menganut dan melaksanakan bentuk praktek demokrasi yang dikenal dengan demokrasi Pancasila, terutama dalam sistem pemerintahan. Dalam memilih pemerintahannya, yang dipahami secara umum adalah suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat melalui suatu sistem pemilihan umum (pemilu) yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang berasaskan Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah bentuk upaya keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Bertepatan tanggal 27 Juni 2018 merupakan hari yang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk keberlanjutan bangsa ini kedepannya. Lima tahun ke depan akan menjadi faktor penentu tercapainya masyarakat yang sejahtera, aman, tentram, dan adil. Tepatnya pada hari Rabu, 171 daerah ikut terlibat dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk melaksanakan Pilkada tersebut, maka lembaga yang diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Abdullah.2005).

Di Sumatera Barat, Selain pemilihan umum legislatif dan eksekutif pada tahun 2019 mendatang, pemilihan kepala daerah juga telah dilaksanakan di empat kota pada tahun 2018, yaitu Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, dan Kota Pariaman. Di Kota Padang sendiri pelaksanaan Pilkada langsung pada tanggal 27 Juni 2018, yaitu pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diikuti oleh Dua pasang kandidat yaitu Emzalmi-Desri dan Mahyeldi-Hendri. Sebelum Pilkada dilaksanakan, KPU Kota Padang terus mendiseminasikan Pilkada 2018 untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Diseminasi terus diselenggarakan sebelum menghadapi pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018. KPU berharap, dengan adanya diseminasi ini tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada menjadi meningkat.

Dalam menyelenggarakan pemilu tentu membutuhkan peran aktif dan partisipasi masyarakat, karena pemilu bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memilih pemimpin sesuai dengan keinginan dan hati nurani mereka. Pemilu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan siapa calon yang akan diberi amanah oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan. Agar pemilu dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan suatu model komunikasi yang dapat digunakan oleh KPU Kota Padang terkait dengan perannya sebagai penyelenggara pemilu. Model Komunikasi yang

dimaksud berfungsi sebagai penghubung antara KPU sebagai institusi/ lembaga pemerintah dengan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu upaya membangun komunikasi dengan masyarakat dilakukan kegiatan diseminasi tentang pemilu. Diseminasi pemilu adalah suatu bentuk komunikasi eksternal yang dilakukan oleh KPU Kota Padang. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Di negara demokrasi pelaksanaan pemilu merupakan hajatan lima tahunan yang dilakukan untuk memilih pemimpin apakah itu Kepala Daerah, Anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena dengan pemilu rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung dengan cara berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya di TPS.

Dengan adanya model komunikasi yang baik yang dilakukan oleh KPU Kota Padang, maka diharapkan visi dan misi terwujud dengan baik. Khusus untuk Pilkada, partisipasi pemilih akan bertambah, serta memunculkan kesadaran politik masyarakat untuk tidak hanya diam, tetapi melakukan aktivitas yang termasuk dalam partisipasi politik masyarakat dengan berbagai jenis tindakan (Henry.2003:71). Dalam penerapan visi dan misi, KPU Kota Padang selalu menegaskan dan menghimbau kepada para pegawainya agar bekerja dengan lebih serius, disiplin dan jujur. Hal tersebut dimungkinkan agar pegawai di kantor tersebut lebih memahami etos kerja dalam pelaksanaan tugas yang dikerjakan. Kemudian KPU Kota Padang akan meminimalisir faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat di

Kota Padang. Karena, dalam komunikasi politik secara umum membahas keterkaitan antara proses komunikasi dan proses politik yang berlangsung (Zaenal.2016:09).

Adanya visi dan misi merupakan syarat wajib bagi sebuah organisasi. Setiap instansi memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing – masing instansi/organisasi tersebut. Visi dan misi KPU Kota Padang merupakan acuan utama yang selalu dihimbau dari pimpinan agar pegawai mengetahui jelas tujuan dan sasaran utama dalam bekerja. Seperti salah satu misinya yakni “Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan”.

Diseminasi pemilu adalah suatu bentuk pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu model komunikasi yang efektif agar pesan-pesan yang berhubungan dengan pemilu dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Banyak sekali ragam informasi pemilu yang harusnya dapat disampaikan kepada masyarakat Kota Padang. Penyampaian pesan tentunya juga harus memperhatikan saluran yang dapat secara efektif menjangkau masyarakat. Berkaca dari beberapa kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Padang, seperti yang sudah dilakukan pada pemilu tahun 2013, diseminasi pemilu hanya mengandalkan media luar ruang, model diseminasi seperti hanya menyediakan informasi tentang

tahapan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh KPU saja, tidak mampu menginformasikan proses pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.

Menelusuri jalan saat musim pemilihan kepala daerah tahun 2013, di sepanjang jalan utama sangat mudah kita temui baliho, spanduk, dan material lainnya mengisi ruang-ruang publik. Di tempat-tempat strategis seperti persimpangan jalan utama, material iklan himbuan untuk berpartisipasi saat Pemilihan Kepala Daerah tidak sulit ditemui pada saat itu. Model komunikasi yang diuraikan di atas disebut dengan istilah media luar ruang, yaitu istilah yang digunakan untuk penggunaan di ruang publik atau ruang terbuka. Ruang publik yang dimaksud adalah ruang yang bisa diakses oleh semua orang. Pelaksanaan diseminasi sering dirumuskan dalam model linear (satu arah) dengan bentuk propaganda saja. Model linear tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menanggapi atau sekedar mengkresek informasi pemilu yang diperoleh. Sehingga ambiguitas atau ketidakpahaman akan proses pelaksanaan pemilu dapat diminimalisir dengan ketersediaan informasi yang mampu mengurangi ketidaktahuan masyarakat tentu pada akhirnya akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Untuk itu, KPU sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan pemilu perlu merancang dan memformat pesan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dengan menedepankan konsep pendidikan, yaitu model komunikasi yang lebih menekankan pada aspek edukasi dan tidak lupa menyematkan konsep hiburan agar komunikasi yang dibangun menjadi menarik dan menyenangkan. Adapun pemakaian model diseminasi satu arah kurang memperhatikan umpan balik dari masyarakat. Sehingga efek dari diseminasi

yang dilakukan kurang memberi dampak yang diinginkan karena hanya monoton satu arah dan hanya menekankan pada aspek formal saja.

Di Pilkada tahun 2018, Perlu adanya terobosan baru yang dilakukan KPU Kota Padang agar kegiatan diseminasi ini lebih menarik, seperti melakukan pendekatan yang lebih disukai oleh masyarakat. Untuk konteks Kota Padang diseminasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang perlu mengedepankan kearifan lokal dalam artian pelaksanaan diseminasi lebih memperhatikan pada budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Seperti memanfaatkan kelompok nelayan, pelajar, kelompok pedagang, dan komunitas-komunitas lainnya yang ada di Kota Padang sebagai momentum untuk mendiseminasikan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat Kota Padang.

Model seperti ini dapat dilakukan dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan bersifat aktivitas dari komunitas tersebut dengan cara mendirikan stand diseminasi pemilu untuk memberikan layanan dan menyediakan data dan informasi tentang pelaksanaan pemilu di Kota Padang, dimana setiap pengunjung stand dapat melakukan pengecekan langsung apakah sudah terdaftar sebagai pemilih melalui perangkat dan sarana yang disediakan oleh KPU Kota Padang. Sehingga diseminasi yang dilakukan dapat berlangsung dengan cara interaktif, karena masyarakat dapat bertanya secara langsung kepada KPU tentang hal-hal yang kurang mereka pahami tentang proses pelaksanaan pemilu.

Model diseminasi tentunya diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu KPU Kota Padang

perlu memikirkan adanya suatu standar dan model diseminasi agar informasi tentang pelaksanaan pemilu ini benar-benar sampai kepada masyarakat luas, sehingga tidak ada lagi kesalahan informasi yang akan mencederai proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Model yang dihasilkan tidak hanya berpengaruh pada proses diseminasi dan hasil pemilu saja, tetapi juga berimplikasi pada kepemimpinan negara/daerah di masa depan, karena fungsi komunikasi secara umum adalah untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang di sekitar, mempengaruhi orang lain untuk berfikir dan berperilaku seperti yang diinginkan.

Oleh karena itu, perlu model komunikasi agar penyelenggara Pemilu tidak terlihat hanya sebatas memberikan informasi tentang Pilkada saja, tetapi juga bagian dari proses diseminasi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya memilih calon pemimpin yang mampu memenuhi harapan bersama. Karena, komunikasi politik adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan bersama dengan cara memberikan pendidikan dan diseminasi yang optimal kepada masyarakat itu sendiri. Dan, komunikasi harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Komunikasi harus bersifat persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, dan lain-lain (Onong.2013:09).

Dari hasil pemutakhiran data pemilih, jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang akan memberikan suaranya pada Pilkada Kota Padang 2018 ini sebanyak 535.265 pemilih. Dari jumlah DPT tersebut pemilih yang memberikan hak suaranya sebanyak 341.281 pemilih atau 63,76 persen. Jika dibandingkan dengan hasil rekapitulasi Pilkada Kota Padang

tahun 2013, dari 560.723 pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 296.003 orang atau 52,79 persen. Untuk hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1: Jumlah total penghitungan suara pada Pilkada langsung di Kota Padang Tahun 2018

Pilkada	Partisipasi	Persentase
2013	296.003 pemilih	52,79 %
2018	535.265 pemilih	63,76 %

Sumber : Diolah dari KPU Kota Padang 2018

Berkaca dari perolehan suara dari pelaksanaan Pilkada di Kota Padang tahun 2013 lebih rendah jika dibandingkan dengan perolehan suara pada tahun 2018 lalu. Ada hal yang mendasar mengapa hal itu bisa terjadi, salah satunya dilihat dari pelaksanaan kegiatan diseminasi pemilu di tahun 2018 lebih variatif jika dibandingkan dengan tahun 2013, perbedaan model diseminasi ini tentunya memiliki kontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Hasil Pilkada tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa salah satu tujuan misi KPU Kota Padang berhasil dilaksanakan. Salah satu asumsi yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilih pada tahun 2018 terletak pada kegiatan diseminasi yang dilaksanakan sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini dilihat dari model komunikasi yang dibangun tidak lagi hanya mengandalkan metode liner yang hanya bersifat satu arah saja, melainkan sudah di kembangkan lagi dengan memanfaatkan media sebagai

saluran komunikasi dengan mengedepankan dialog dengan masyarakat untuk setiap kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang.

Walaupun adanya peningkatan partisipasi pemilih yang berhasil dicapai oleh KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 belumlah menyentuh target capaian partisipasi pemilih yang ditargetkan oleh KPU Republik Indonesia secara nasional, untuk daerah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018 KPU RI memasang target capaian partisipasi pemilih sebesar 77,5% dari jumlah penduduk yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun hal itu belum bisa dicapai oleh KPU Kota Padang karena banyaknya faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat saat pemilu berlangsung.

Mengacu pada hal di atas, maka perlu dibuat suatu terobosan baru tentang kegiatan terkait dengan pelaksanaan diseminasi di setiap pelaksanaan pemilu agar pesan yang disampaikan dapat mengedukasi dan mempersuasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Padang. Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih ini, diantaranya yaitu masih kurangnya diseminasi yang dilakukan kepada masyarakat, serta sikap apatis masyarakat terhadap pemilu itu sendiri karena tak jarang pemimpin yang terpilih melalui pemilu lupa dengan janji-janji yang diberikan kepada masyarakat saat mencalonkan diri sebagai pasangan calon yang maju menjadi Kepala Daerah. Disinilah peran KPU Kota Padang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, dimana komunikasi berguna untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat (Hafied.2011:27). Partipasi politik erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap

calon yang akan dipilih sebagai pemimpin. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dengan atau memenuhi hidupnya (Ramlan.1992:5).

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting dalam rangka mendewasakan warga negara (Arbi.1997:158). Inilah tugas bersama kita yang kemudian dibebankan kepada KPU sebagai penyelenggara Pilkada. KPU tidak hanya mampu meningkatkan angka pemilih saja, tetapi juga mampu memberikan diseminasi dalam bentuk pendidikan untuk menentukan pilihan calon Kepala Daerah yang diinginkan masyarakat. Dari sisi substansi ini muncul salah satu tantangan bagi KPU dalam Pilkada serentak tahun 2018, yaitu ajakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, mendiseminasikan kepada masyarakat agar menggunakan hak suaranya pada Pilkada.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **Proses Diseminasi Informasi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Tahun 2018 dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih.**

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan partisipasi pemilih yang terjadi pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2018 di Kota Padang, tidak lepas dari peranan KPU Kota Padang yang berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang pemilu yang beragam, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pendekatan dan membangun komunikasi dengan masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dalam rangka menggunakan hak politiknya untuk memilih Kepala Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah model komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam pelaksanaan proses diseminasi informasi tentang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis kegiatan proses diseminasi informasi tentang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.
2. Untuk menganalisis model komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada berbagai kalangan atau stake holder seperti kalangan pejabat pemerintahan, Kepala Daerah khususnya dan masyarakat pada umumnya yang tertarik tentang model komunikasi.

1.4.2 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis model komunikasi dan proses diseminasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kota Padang, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

1.4.3 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kepala Daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat bahwa dalam upaya memahami komunikasi harus dapat menjawab lima unsur komunikasi, yakni komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek/pengaruh. Berdasarkan lima unsur tersebut komunikasi yang efektif akan menimbulkan efek tertentu, serta membangun dan memelihara hubungan baik antar seluruh elemen masyarakat.

